

Model Kolaborasi *Pentahelix* dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Ratu Niken Soraya¹, Jumanah²

^{1,2}Program Studi Administrai Publik, Institut Kemandirian Nusantara

¹ratunikensoraya@gmail.com*, ²jumanah1011@gmail.com

*corresponding author

Article Info

Article History

Received:

06 May 2026

Accepted:

09 June 2026

Published:

10 June 2026

Kata Kunci

Model *Pentahelix*,
Ekonomi Kreatif,
Kolaborasi
Multipihak,
Dinas Pariwisata
Provinsi Banten

Keywords

Pentahelix Model,
Creative Economy,
Multi-Stakeholder
Collaboration,
Tourism Office,
Banten Province.

Abstrak

Pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, diperlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media sebagaimana dikonsepsikan dalam model *Pentahelix*. Provinsi Banten memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar, namun pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan sinergi antaraktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan model *Pentahelix* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata Provinsi Banten, mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing aktor, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi yang terbangun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur terhadap 18 informan yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Data penelitian juga diperkuat melalui observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi *Pentahelix* dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten masih berada pada tahap berkembang (*emerging Pentahelix model*) dengan karakteristik kolaborasi yang bersifat programatik, jangka pendek, dan didominasi oleh pemerintah. Dinas Pariwisata berperan sebagai aktor utama yang mengoordinasikan berbagai kegiatan, sementara keterlibatan aktor nonpemerintah belum optimal sebagai mitra strategis. Efektivitas kolaborasi dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, belum tersedianya forum kolaborasi permanen, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha ekonomi kreatif.

Abstract Creative economy development has become an important strategy for enhancing regional competitiveness and promoting sustainable economic growth. Its implementation requires multi-stakeholder collaboration involving government, academia, businesses, communities, and media, as conceptualized in the Pentahelix model. Banten Province possesses considerable creative economy potential; however, its development continues to face various challenges that require stronger stakeholder synergy. This study aims to examine the implementation of the Pentahelix model in creative economy development at the Tourism Office of Banten Province, identify the roles and contributions of each stakeholder, and analyze factors affecting the effectiveness of collaboration. The study employed a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through semi-structured interviews with 18 informants representing government institutions,

academics, business actors, communities, and media organizations. The findings were further supported by participatory observation and document analysis. The results reveal that the Pentahelix collaboration in Banten Province remains at an emerging stage, characterized by program-oriented, short-term, and government-driven collaboration patterns. The Tourism Office serves as the dominant orchestrator in coordinating collaborative activities, while non-government stakeholders have not yet fully functioned as strategic partners. The effectiveness of collaboration is constrained by weak cross-sector coordination, the absence of a permanent collaborative forum, limited supporting infrastructure, and low digital literacy among creative economy entrepreneurs. Strengthening institutional collaboration and stakeholder engagement is therefore essential to achieving sustainable creative economy development in Banten Province.

Pendahuluan

Ekonomi kreatif merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi modern yang berbasis pada kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan kekayaan budaya dan pengetahuan lokal. Di Indonesia, ekonomi kreatif diakui secara nasional sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi tersebut menegaskan peran ekonomi kreatif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat identitas budaya bangsa di tengah persaingan global.

Provinsi Banten sebagai salah satu daerah di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Keberagaman budaya, tradisi lokal, serta ketersediaan sumber daya alam menjadi modal penting bagi tumbuhnya berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti seni, desain, kuliner, kriya, dan teknologi informasi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pariwisata budaya dan tradisi lokal di Banten merupakan aset utama dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan (Mafrudoh, 2025). pariwisata adalah salah satu sektor yang menyumbang devisa terbesar bagi Indonesia (Nugroho et al., 2026). Pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten juga menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan pariwisata yang tercermin dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2023–2026.

Pengembangan ekonomi kreatif pada dasarnya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara mandiri. Akademisi berperan menyediakan dukungan keilmuan melalui penelitian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pelaku usaha berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi kreatif. Komunitas berperan sebagai wadah

partisipasi dan pelestarian nilai-nilai lokal, sementara media memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi dan promosi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan pola kolaborasi terstruktur antar berbagai pemangku kepentingan, yang dalam konteks ini relevan dengan pendekatan Pentahelix. Pendekatan pentahelix telah didorong oleh pemerintah untuk memastikan sinergi dan integrasi program di berbagai tingkat pemerintahan hingga tingkat desa (Aseni & Jumanah, 2025)

Namun demikian, dalam implementasinya pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten masih menghadapi berbagai permasalahan. Keterbatasan wadah pelatihan bagi pelaku UMKM, minimnya alat pendukung usaha, belum jelasnya legalitas usaha, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan yang signifikan. Studi Sugandi dan Junaidi (2025) menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi Pentahelix di sektor kreatif, kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif antar aktor menjadi hambatan utama dalam inovasi dan promosi produk unggulan daerah.

Tinjauan Pustaka

1. Model Pentahelix

Model Pentahelix merupakan pengembangan dari kerangka Triple Helix yang awalnya hanya melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Model ini kemudian diperluas dengan menambahkan unsur komunitas dan media sebagai aktor penting dalam membangun ekosistem pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, model Pentahelix menempatkan lima aktor utama pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media sebagai elemen yang saling berinteraksi dan berkolaborasi dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial.

Penambahan unsur komunitas dan media dilatarbelakangi oleh kebutuhan mengakomodasi partisipasi masyarakat secara lebih luas serta pentingnya peran diseminasi informasi dan pembentukan opini publik. Dalam konteks ekonomi kreatif, kedua aktor tersebut memiliki posisi strategis karena mampu memperkuat identitas lokal, mendorong inovasi berbasis budaya, serta memperluas jangkauan pasar melalui promosi dan komunikasi publik.

2. Collaborative Governance

Teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks memerlukan keterlibatan berbagai aktor dalam suatu forum bersama untuk mencapai konsensus. Pendekatan ini menekankan bahwa kolaborasi bukanlah proses spontan, melainkan membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat, termasuk struktur inklusif, transparansi, dan aturan prosedural yang jelas agar legitimasi dan efektivitas kolaborasi dapat terjaga.

Kepemimpinan fasilitatif memiliki peran sentral dalam mengatasi ketimpangan kekuasaan antar aktor. Pemimpin berfungsi sebagai mediator yang mendorong dialog, membangun kepercayaan, serta memberdayakan aktor yang lebih lemah agar tercapai kesepakatan bersama (Tomo et al., 2020). Widodo et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi Pentahelix tidak cukup hanya berhenti pada kerja sama administratif, tetapi harus menghasilkan co-innovation yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi kreatif.

3. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat manusia sebagai aset utama dalam menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kerangka hukum ekonomi kreatif ditetapkan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.

Inovasi merupakan elemen kunci dalam pengembangan ekonomi kreatif karena mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta membuka peluang pasar baru. Ekosistem kreatif dipahami sebagai jaringan aktor, sumber daya, regulasi, dan infrastruktur yang saling mendukung dalam mendorong perkembangan sektor kreatif (Susanti et al., 2023). Transformasi digital semakin memperluas ruang kolaborasi, di mana platform digital menjadi sarana penghubung utama antar aktor dalam memperluas akses pasar dan mempercepat inovasi (Wibowo & Santoso, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena yang bersifat kompleks dan kontekstual, berfokus pada penyediaan data rinci mengenai kasus tertentu yang terikat oleh waktu, tempat, dan aktor yang terlibat.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Pariwisata merupakan instansi yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan dan implementasi program pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat provinsi.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan 18 informan yang terdiri dari: (1) Informan kunci: Kepala Dinas Pariwisata (K1), Kabid Ekraf dan Industri (K2), dan Kabid Destinasi (K3); serta (2) Informan tambahan: perwakilan Dinas Koperasi dan UKM, DISPERINDAG, tiga akademisi dari perguruan tinggi, enam pelaku UMKM ekonomi kreatif, dua ketua komunitas, dan dua praktisi media.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data mengenai proses, faktor pendukung, kendala, dan dampak kolaborasi; (2) observasi partisipatif untuk mengamati dinamika kolaborasi secara langsung dalam forum koordinasi, pertemuan stakeholder, dan aktivitas usaha kreatif; serta (3) studi dokumen meliputi kebijakan daerah, laporan kinerja dinas, dan data UKM. Analisis data dilakukan mengacu pada model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi melalui triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Provinsi Banten dan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Provinsi Banten merupakan provinsi ke-30 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Secara geografis, Banten terletak di bagian barat Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga pusat

pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan luas wilayah 8.794,01 km² yang mencakup 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa, Banten memiliki potensi ekonomi dan budaya yang besar untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Keragaman budaya lokal yang dimiliki menjadi sumber daya penting dalam pengembangan berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti kriya, kuliner, seni pertunjukan, dan fesyen berbasis kearifan lokal. Produk unggulan seperti Batik Banten, Golok Ciomas, kerajinan Kulit Berenuk, dan Tas Kulit Kayu menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai media pelestarian identitas budaya daerah.

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi kreatif di Provinsi Banten masih berada pada tahap berkembang (emerging ecosystem). Aktivitas ekonomi kreatif masih didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak pada subsektor kuliner, kriya, seni budaya, dan fesyen dengan skala usaha rumah tangga. Sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan modal usaha, pemanfaatan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan akses terhadap pasar yang lebih luas. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing produk kreatif daerah belum berkembang secara optimal.

Temuan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif yang menjelaskan bahwa:

“Produk yang kami hasilkan sebenarnya memiliki pasar yang cukup baik, tetapi kendala terbesar masih pada permodalan dan pemasaran. Kami juga belum banyak memanfaatkan teknologi digital karena keterbatasan pengetahuan dan pendampingan yang berkelanjutan.” (Informan PU-02, 2025)

Selain menghadapi kendala pada tingkat usaha, penelitian juga menemukan bahwa hubungan antaraktor dalam ekosistem ekonomi kreatif masih bersifat parsial dan sektoral. Program pengembangan ekonomi kreatif umumnya dilaksanakan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing institusi tanpa adanya kerangka koordinasi jangka panjang yang terintegrasi. Akibatnya, berbagai program yang dijalankan sering kali berjalan sendiri-sendiri dan belum mampu membentuk sinergi

yang kuat antaraktor Pentahelix. Kondisi ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dari unsur akademisi yang menyatakan:

“Setiap pihak sebenarnya sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung ekonomi kreatif, tetapi koordinasinya masih belum terbangun secara sistematis. Belum ada wadah kolaborasi yang permanen sehingga kerja sama yang dilakukan biasanya hanya berlangsung ketika ada program atau kegiatan tertentu dari pemerintah.” (Informan AK-01, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten masih menghadapi tantangan kelembagaan berupa lemahnya integrasi antaraktor. Meskipun masing-masing pihak telah berupaya menjalankan perannya, belum terbentuk mekanisme kolaborasi yang mampu menghubungkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media secara berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekosistem ekonomi kreatif di Provinsi Banten masih berada pada fase transisi menuju model kolaboratif yang lebih matang, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pembangunan forum kolaborasi yang permanen untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

2. Penerapan Model Pentahelix dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan temuan lapangan, penerapan model Pentahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten menunjukkan adanya upaya kolaborasi multipihak yang melibatkan lima aktor utama, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Model Pentahelix di Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai model kolaborasi yang sedang berkembang (*emerging Pentahelix model*), yang masih bersifat parsial, programatik, dan jangka pendek.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata berperan dominan sebagai orchestrator ekosistem, menginisiasi dan mengoordinasikan kolaborasi Pentahelix. Peran ini mencerminkan karakter *government-driven Pentahelix*, di mana kolaborasi multipihak belum sepenuhnya berkembang menjadi kolaborasi yang setara antar aktor sebagaimana idealnya model Pentahelix (Ansell & Gash, 2008).

Belum terdapat mekanisme tata kelola kolaboratif yang secara jelas mengatur peran, tanggung jawab, serta indikator kinerja masing-masing aktor. Kondisi ini

sejalan dengan temuan Emerson et al. (2012) yang menekankan pentingnya collaborative governance regime dalam memastikan keberlanjutan kolaborasi multipihak.

3. Kebijakan dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten disusun mengacu pada kebijakan nasional dan dokumen RPJMD Provinsi Banten yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai sektor strategis yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing daerah. Program-program yang dilaksanakan meliputi pelatihan dan pendampingan pelaku usaha, fasilitasi promosi dan pameran produk kreatif, serta penyelenggaraan berbagai event pariwisata. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan program tersebut masih cenderung bersifat programatik dan berorientasi pada pencapaian target kegiatan tahunan. Kondisi ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang menyatakan bahwa:

“Selama ini program ekonomi kreatif yang kami jalankan memang lebih banyak difokuskan pada pelatihan, pameran, dan event promosi yang disesuaikan dengan target kinerja tahunan. Untuk penyusunan kebijakan, arahan utama masih berasal dari pemerintah daerah dan dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan, sementara masukan dari pihak luar biasanya diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.” (Informan DP-01, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi kebijakan masih lebih menekankan pada pencapaian output kegiatan dibandingkan outcome jangka panjang berupa penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif belum berlangsung secara optimal. Aktor akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media umumnya dilibatkan pada tahap implementasi sebagai peserta, fasilitator, atau narasumber kegiatan, sementara perannya dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengungkapkan:

“Kami sering dilibatkan sebagai peserta, narasumber, atau pendamping dalam kegiatan ekonomi kreatif yang diselenggarakan pemerintah. Namun, keterlibatan kami dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas. Padahal pelaku usaha dan komunitas memiliki banyak informasi mengenai kebutuhan lapangan yang dapat menjadi masukan untuk pengembangan ekonomi kreatif yang lebih berkelanjutan.” (Informan PU-03, 2025).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pola kolaborasi yang terbangun masih bersifat *government centric*, di mana pemerintah daerah tetap menjadi aktor dominan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program. Akibatnya, potensi kontribusi aktor non-pemerintah sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi model *Pentahelix* di Provinsi Banten masih berada pada tahap berkembang dan memerlukan penguatan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.

4. Peran dan Kontribusi Masing-Masing Aktor *Pentahelix*

a. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator kolaborasi. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan dan program strategis. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan pelatihan peningkatan kapasitas, fasilitasi pameran dan promosi produk, serta pendampingan legalitas usaha. Sebagai katalisator, pemerintah mendorong sinergi antar-stakeholder dan menjembatani kepentingan berbagai aktor.

Tabel 1. Peran Pemerintah dalam Kolaborasi *Pentahelix*

Instansi	Peran Utama	Fungsi dalam <i>Pentahelix</i>	Contoh Keterlibatan
Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Leading sector pengembangan ekraf	Regulator, fasilitator, katalisator	Program ekraf, event kreatif, kolaborasi komunitas
Dinas Perindustrian	Penguatan industri kreatif & UMKM	Fasilitator	Pameran, hilirisasi produk kreatif

dan Perdagangan			
Dinas Koperasi dan UMKM	Pengembangan wirausaha kreatif	Fasilitator	Pelatihan UMKM, akses pembiayaan

b. Peran Akademisi

Akademisi memiliki peran strategis sebagai penghasil pengetahuan, inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kontribusi akademisi terlihat dalam tiga aspek: riset yang menghasilkan rekomendasi kebijakan, pendidikan yang mencetak wirausaha kreatif, dan pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan UMKM. Perguruan tinggi yang terlibat antara lain Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Universitas Banten Jaya (UNBAJA), dan Politeknik Pariwisata Sahid. Namun demikian, peran akademisi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam perencanaan kebijakan ekonomi kreatif secara sistematis.

c. Peran Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Pelaku usaha ekonomi kreatif merupakan aktor inti dalam ekosistem Pentahelix sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi kreatif dan motor penggerak pertumbuhan melalui pengembangan produk berbasis kreativitas dan budaya lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha, khususnya UMKM kreatif, lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat program dibandingkan sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan. Keterbatasan kapasitas manajerial, akses informasi, dan daya tawar membatasi keterlibatan aktif pelaku usaha.

d. Peran Komunitas Kreatif

Komunitas kreatif berperan sebagai penggerak sosial dalam pengembangan ekonomi kreatif, menciptakan ruang interaksi antar-pelaku kreatif melalui workshop, pameran, festival, dan forum diskusi. Komunitas juga menjaga keberlanjutan budaya lokal sebagai sumber inspirasi ekonomi kreatif. Komunitas strategis yang teridentifikasi meliputi Forum Ekonomi Kreatif Banten (FEKRAF Banten), Banten Creative Festival Network, ICN Banten, dan berbagai komunitas kreatif berbasis

kabupaten/kota. Namun, keterlibatan komunitas dalam kerangka Pentahelix masih bergantung pada agenda program pemerintah.

e. Peran Media

Media berperan penting dalam memperluas jangkauan promosi serta membangun citra positif ekonomi kreatif daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran media masih difokuskan pada publikasi kegiatan dan promosi destinasi wisata. Peran media sebagai mitra strategis dalam membangun narasi ekonomi kreatif dan memperluas akses pasar produk kreatif belum dimanfaatkan secara optimal. Media yang terlibat meliputi RRI Banten, BantenNews.co.id, Radar Banten, Tangerang Ekspres, serta influencer dan content creator lokal Banten.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kolaborasi Pentahelix

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi Pentahelix di Provinsi Banten: Faktor pendukung meliputi: (1) komitmen pemerintah daerah yang cukup kuat sebagaimana tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; (2) keberadaan potensi budaya lokal yang kaya sebagai modal utama pengembangan ekonomi kreatif; (3) ketersediaan komunitas kreatif aktif di berbagai kabupaten/kota; serta (4) perkembangan media digital yang membuka peluang promosi lebih luas.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi: (1) ketiadaan forum kolaborasi Pentahelix yang bersifat permanen dan inklusif; (2) koordinasi antar aktor yang berlangsung secara ad hoc dan terfragmentasi; (3) keterbatasan sumber daya berupa anggaran, SDM, dan fasilitas; (4) rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha; (5) ego sektoral dan perbedaan kepentingan antar aktor; serta (6) mekanisme komunikasi yang masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan model kolaborasi Pentahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah berjalan namun masih berada pada tahap berkembang (emerging). Kolaborasi yang terbangun cenderung

bersifat programatik, jangka pendek, dan didominasi oleh peran pemerintah sebagai aktor utama (*government-driven*), sementara keterlibatan aktor lain seperti akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media belum sepenuhnya optimal sebagai mitra strategis. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi meliputi adanya komitmen pemerintah daerah, potensi budaya lokal, keberadaan komunitas kreatif, serta dukungan media digital. Namun demikian, kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, belum adanya forum kolaborasi permanen, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas model Pentahelix, terutama melalui pembentukan forum kolaborasi yang terlembaga, peningkatan kapasitas aktor non-pemerintah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, diperlukan pergeseran orientasi kebijakan dari yang berfokus pada output jangka pendek menuju outcome jangka panjang yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model implementasi kolaborasi Pentahelix berbasis digital atau membandingkan praktik kolaborasi di daerah lain guna memperoleh model yang lebih adaptif dan aplikatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Aseni, A., & Jumanah. (2025). Stakeholder collaboration in handling stunting and malnutrition cases in Mekarjaya Subdistrict, Pandeglang District. *Neo Journal of Economy and Social Humanities (NEJESH)*, 4(1), 179–189.
- Avoyan, A. (2022). Collaborative governance in Africa's national parks: A systematic literature review of models and practices. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*.
- Bianchi, C., et al. (2021). Collaborative governance and thick accountability in public administration. *Administrative Sciences*, 11(4), Article 127. <https://doi.org/10.3390/admsci11040127>
- Choirul, S. (2020). Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. *DAPU6107*, 1, 7–8.
- Danim, S. (2000). Pengantar studi penelitian kebijakan. Bumi Aksara.
- Darmawati, D. M., Safahi, L., Azhar, E., Alimudin, M., & Busyra, N. (2025). Improving the creative economy through training in making aloe vera dish liquid soap with the

- Participatory Rural Appraisal method. *Ta'awun*, 5(1), 16–30.
<https://doi.org/10.37850/taawun.v5i01.810>
- Darsono, D., Sukmawati, E., Widodo, Z. D., Tanipu, F., Susilowati, E. M., & Tahirs, J. P. (2023). Dinamika kolaborasi industri dalam ekosistem ekonomi kreatif: Studi literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5185–5192.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7011>
- Feoh, P. N. (2024). Local stakeholders collaboration in blue economy development towards poverty alleviation in coastal areas (Study: Indonesia). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 365–373. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i2.zy4q0q45>
- Fitriani, D., & Hadi, S. (2021). The role of pentahelix collaboration in developing creative economy in Indonesia. *Journal of Regional Development*, 12(3), 45–57.
- Golysheva, I. V. (2025). The cultural potential of creative industries in the modernization of the socio-cultural sphere. *Society: Philosophy, History, Culture*, 1, 115–121.
<https://doi.org/10.24158/fik.2025.1.14>
- Hakim, U. H. (2022). Pentahelix strategy in tourism planning in Hegarmukti Village, Cikarang, Bekasi Regency, West Java. *Destinesia: Journal of Hospitality and Tourism*, 4(2), 56–65.
- Kang, W. (2024). A systematic review: Bridging the digital divide in SME digitalization. *ATOM Journal*, 2024(2). <https://doi.org/10.62594/atom0002>
- Khusaini. (2023). Stakeholders collaboration in optimizing tourism and creative economy integration. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 6(1), 12–25.
- Mafrudoh, L. (2025). Regional tourism in Banten: Potential and development. *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting*, 5(6), 5838–5845.
<https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i6.3700>
- Nazar Naamy, H. (2019). Metodologi penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasinya. Rake Sarasin.
- Nugroho, A., Jumanah, Stiawati, T., & Handoko, P. (2026). Policy connectivity and fiscal decentralization in encouraging economic development through marine tourism in Banten Province. *Neo Journal of Economy and Social Humanities (NEJESH)*, 5(1), 216–224.
- Nugroho, B., & Kurniawan, A. (2022). Inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kreatif*, 5(2), 101–115.
- Onukwulu, E. C., Dienagha, I. N., Digitemie, W. N., Egbumokei, P. I., & Oladipo, O. T. (2025). Enhancing sustainability through stakeholder engagement: Strategies for effective circular economy practices. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 22(1), 135–150. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2025/v22i1950>
- Osei, F., et al. (2024). Does collaborative governance work? Looking at Ghana's response to the COVID-19 pandemic. *ResearchGate Preprint*.
<https://www.researchgate.net/publication/385623090>

- Polishchuk, O. A., Gracheva, N. A., Dushkina, V. A., & Kovaleva, M. V. (2025). The state and development trends of the creative economy. *Izvestiya Yugo-Zapadnogo Gosudarstvennogo Universiteta*, 14(6), 105–119. <https://doi.org/10.21869/2223-1552-2024-14-6-105-119>
- Pratama, A., & Kusnadi, R. (2022). Multi-stakeholder collaboration and innovation in creative industry development. *International Journal of Creative Economy*, 8(2), 134–149.
- Putri, V. K., Ainulhaq, N., & Rahmadani, K. (2024). Development of e-books oriented to Banten culture integrated with challenge-based learning to improve elementary school students' creative thinking skills in science learning. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(3), 1160–1170. <https://doi.org/10.21009/jtp.v26i3.49930>
- Rahayu, R. D., Pramitasari, A., & Ardiyansah, A. (2024). Collaborative governance pentahelix ABCMG+ dalam pengelolaan program bank sampah di Kota Bekasi. *REFORMASI*, 14(2), 257-270.
- Rahmawati, N., & Maulana, H. (2025). Collaborative governance and sustainable creative economy development. *Journal of Public Policy and Governance*, 15(1), 77–92.
- Sari, I. P., Nurranto, H., & Miftah, Z. (2025). Development of creative economy for Madura Odheng crafts based on digital innovation to support the SDGs in relatively underdeveloped areas in Madura Island. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2). <https://doi.org/10.47172/2965-730X.sdgsreview.v5.n02.pe03769>
- Sibileva, E. V., & Shelomova, V. A. (2025). Development of the creative economy in the Republic of Sakha (Yakutia). *Arctic XXI Century*, 4(4), 85–93. <https://doi.org/10.25587/2310-5453-2024-4-85-93>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, Y., & Hakim, L. (2023). Strengthening local creative economy through the pentahelix model: Case study in Banten Province. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 11(1), 25–39.
- Susanti, R., Putra, A., & Lestari, M. (2023). Ekosistem kreatif dan dampaknya terhadap pertumbuhan startup di Indonesia. *Journal of Creative Economy Studies*, 7(1), 45–62.
- Takaendengan, M., Pantow, V., Loegimin, M., & Pangemanan, K. (2025). Optimization of tourism management, promotion of tourist attractions, and creative economy based on Android applications in Kulu Village, Wori District, North Minahasa Regency. *ICONMTHS Proceedings*, 1(1), 272–278. <https://doi.org/10.33649/iconmths.v1i1.458>
- Tomo, A., et al. (2020). Facilitative leadership and collaborative governance. *Journal of Public Administration Research*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Walid Sugandi, Y. B., & Junaidi, M. (2025). Stakeholder collaboration through the pentahelix model in the Tetebatu Nature Fest 2024 event. *JMET: Journal of*

- Management, Entrepreneurship and Tourism, 3(1), 177–187.
<https://doi.org/10.61277/jmet.v3i1.186>
- Wang, Z. M. (2025). Research on integration of innovation and entrepreneurship education resources based on embedded neural network algorithm. *International Journal of High Speed Electronics and Systems*. <https://doi.org/10.1142/S0129156425403377>
- Wardhani, S. (2024). Peran ekosistem kreatif dalam mendukung inovasi dan pasar global. *Indonesian Journal of Entrepreneurship and Creative Industry*, 3(1), 77–92.
- Wibowo, B., & Santoso, D. (2024). Digital transformation and multi-stakeholder collaboration in Indonesia's creative economy. *Asian Journal of Innovation Policy*, 13(2), 201–217.